

## KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM KASUS NATUNA DAN KASUS TERORISME GLOBAL

Alsa Yunita Pradina<sup>1</sup>

Nurul Diah Pitaloka<sup>2</sup>

Renaldi Afriansyah<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Ilmu Hubungan Internasional<sup>1,2,3</sup>.

Alamat Email: [alsayunita7@gmail.com](mailto:alsayunita7@gmail.com), [nuruldaihpitaloka@gmail.com](mailto:nuruldaihpitaloka@gmail.com)

### Abstrak

Sebagai Negara Maritim, Indonesia sering kali menjumpai permasalahan mengenai perbatasan termasuk juga permasalahan terorisme global. Salah satu kekuatan yang signifikan dalam konteks internasional saat ini adalah kelompok teroris yang berusaha mengganggu tatanan global dengan tindakan-tindakan yang berpotensi membahayakan. Mengingat perubahan yang terjadi dalam situasi strategis global dan regional, tindakan yang paling realistis adalah menjalin kerja sama, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah terorisme yang terjadi secara Global yang memiliki pengaruh terhadap Indonesia. Serta bagaimana pemerintahan Indonesia dalam menghadapi krisis ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan melalui tulisan-tulisan terdahulu. Dengan hasil dimana ditemukannya *Down to Earth Diplomacy* di era Presiden Joko Widodo dimana Indonesia Menitikberatkan pada kepentingan dalam negeri, khususnya masalah sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada warga Indonesia, sambil tetap memperhatikan aspek kebijakan luar negeri. Joko Widodo memberikan prioritas pada kebijakan luar negeri yang berfokus pada bidang ekonomi yang memberikan keuntungan konkret bagi Indonesia.

**Kata Kunci:** *Terorisme Global, Down To Earth Diplomacy, Kebijakan Luar Negri*

### Abstract

*As a maritime country, Indonesia often encounters problems regarding borders, including global terrorism problems. One of the significant forces in the current international context is terrorist groups that seek to disrupt the global order with potentially dangerous actions. Considering the changes occurring in the global and regional strategic situation, the most realistic action is to establish cooperation, both through bilateral and multilateral relations. The aim of this research is to identify terrorism problems that occur globally which have an influence on Indonesia. And how the Indonesian government is dealing with this crisis. The research method used is qualitative with an approach through previous writings. With the results of the discovery of Down to Earth Diplomacy in the era of President Joko Widodo where Indonesia focused on domestic interests, especially social and economic issues that had a direct impact on Indonesian citizens, while still paying attention to aspects of foreign policy. Joko Widodo prioritizes foreign policy that focuses on the economic sector which provides concrete benefits for Indonesia.*

**Keywords:** *Global Terorisme, Down to Earth Diplomacy, Foreign Policy*

## A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara Maritim, Indonesia sering kali menjumpai permasalahan mengenai perbatasan termasuk juga permasalahan terorisme global. Pada era kepresidenan bapak Susilo Bambang Yudoyono, beliau memiliki visi dimana kedepannya ia ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan zero enemies. Atau dimana sebuah negara yang tidak memiliki ancaman langsung, mengutamakan pendekatan kekuasaan lunak (*soft power*) dan berorientasi pada isu-isu strategis tingkat tinggi (*high politics*) serta

berupaya meningkatkan pengaruh Indonesia di panggung global. Sementara itu, kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih cenderung berfokus pada upaya memperkuat sektor-sektor dalam negeri.

Masalah mungkin timbul ketika negara tidak seimbang dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Pembangunan di kawasan Natuna tidak akan berjalan maksimal jika hanya dilakukan oleh Pemerintah pihak Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya aktor yang terlibat di kawasan Laut Cina Selatan. Dengan demikian, ketegangan masuk Laut Cina Selatan terus meluas seiring dengan munculnya ketegangan di perairan Pulau Natuna mendeklarasikan Indonesia sebagai bagian dari aktor utamanya (Wardana et al., 2020). Ketegangan Indonesia atas China di perairan Natuna telah terjadi meningkat sejak tahun 2009 Tiongkok telah mengklasifikasikan sejumlah perairan di Laut Cina Selatan, termasuk wilayah Natuna, sebagai bagian dari wilayahnya dalam peta wilayah yang dikenal sebagai 'sembilan garis putus-putus'. Garis-garis ini merupakan batasan atau tanda pemisah yang digunakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk menuntut sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, yang juga menjadi sumber konflik dengan beberapa negara di kawasan Asia. Bagi Indonesia, kehadiran Tiongkok di Selatan Laut China yang memasuki kawasan Natuna merupakan fenomena yang harus dilihat dari banyak sisi. Itu sisi positifnya, kehadiran Tiongkok bisa menambah nilai ekonomi jika kedua negara bisa berkontribusi perkembangan Natuna, sebaliknya akan berdampak negatif jika China memperluas wilayah pengaruhnya Indonesia sebenarnya tidak ingin berada di wilayah konflik.

Penguasaan wilayah Laut Cina Selatan mempunyai dampak langsung terhadap negara-negara yang berada Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ketergantungan ekonomi antar ASEAN negara-negara akan terhambat oleh perselisihan di Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi ini dapat berujung pada sebuah kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada APBN Indonesia, serta masa depan nasionalisme Indonesia di Pulau Natuna. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengeksplorasi perkembangannya konflik di Laut Cina Selatan di perairan Pulau Natuna dan menganalisis dampaknya terhadap Indonesia nasionalisme di Pulau Natuna yang mana berbatasan langsung dengan kawasan Laut Cina Selatan.

Kabupaten Natuna, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dan terletak di tengah-tengah Laut Cina Selatan, telah menjadi sumber ketegangan dalam isu kedaulatan Republik Indonesia. Kontroversi ini muncul pada tahun 2009 dan menjadi semakin tegang setelah Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat Tiongkok yang mencakup wilayah yang kaya akan sumber daya gas alam di Natuna (Tampi, 2017). Klaim garis putus-putus yang dibuat oleh Tiongkok sebagai revisi terhadap peta tahun 1947 telah menyebabkan ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok. Meskipun sebenarnya, Indonesia memiliki niat untuk menjadi mediator antara negara-negara yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan.

Pemerintahan Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan protes melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Namun, selama lima tahun terakhir, PBB belum mengambil sikap terhadap protes pemerintah Indonesia. Setelah Presiden Joko Widodo berkuasa, ia ingin menegaskan sikapnya terhadap Pulau Natuna, dan bahkan lebih keras dari tindakan yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketegangan di Natuna semakin tegang Sejak insiden perahu motor Kway Fey dengan bendera Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna pada awal tahun 2016, peristiwa tersebut telah menimbulkan respon resmi dari Pemerintah Indonesia. Pihak berwenang Indonesia mengecam tindakan tersebut karena upaya operasi oleh tim KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) diganggu oleh kapal patroli milik badan keamanan laut Tiongkok. Kapal penjaga pantai Angkatan Laut Tiongkok mengalami kerusakan serius selama insiden tersebut. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan kekerasan terhadap kapal yang baru saja ditangkap oleh operasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL). Akibatnya, ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok semakin meningkat. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengeksplorasi

Selanjutnya bagaimana perkembangan nasionalisme Indonesia di Pulau Natuna di tengah arus yang semakin berkembang konflik di Laut Cina Selatan. Sebagai daerah yang kebanyakan negaranya masih Negara berkembang ASEAN masih dihadapkan pada tantangan keamanan yang timbul akibat perubahan dalam lingkungan strategis. Beberapa isu yang mencakup sengketa di Laut China Selatan, krisis kemanusiaan Rohingya,

penangkapan ikan ilegal, perselisihan perbatasan, tindak perompakan di laut, dan terorisme telah menjadi masalah yang perlu diatasi. Saat ini, dunia berada dalam fase multipolaritas, yang ditandai oleh adanya berbagai pusat kekuatan yang berkontribusi pada keragaman aktor-aktor dalam hubungan internasional. Salah satu aktor yang memiliki pengaruh besar dalam arena internasional saat ini adalah kelompok teroris yang berusaha mengganggu struktur global dengan tindakan yang berbahaya.

Kompleksitas dan pergeseran isu keamanan global pun berdampak langsung pada Indonesia. Ancaman terorisme diposisikan sebagai salah satu isu keamanan global yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara. Bagaimanapun juga tindakan terorisme adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh agama manapun. Kelompok ini akan selalu memanfaatkan atau mengeksploitasi celah-celah kelemahan pada suatu negara, khususnya dari pantauan aktor keamanan dan jeratan aparat penegak hukum (Reksoprodjo et al., 2018). Sebagai sebuah isu global, ancaman terorisme telah menyerang berbagai negara di berbagai belahan dunia (Tatara et al., 2023). Di Eropa, Sejak tahun 2013, jumlah kasus terorisme di Uni Eropa mengalami peningkatan. Menurut laporan BBC, dari tahun 2011 hingga 2018, kasus terorisme terbanyak terjadi di Spanyol dengan jumlah 343 kasus. Di posisi kedua ditempati oleh Inggris dengan total 329 kasus, kemudian Prancis dengan 327 kasus, dan Belgia sebanyak 301 kasus (Hutasoit et al., 2021).

Melihat perkembangan lingkungan strategis global dan regional tersebut, kerja sama baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral menjadi langkah yang paling realistis. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak ada negara yang mampu mengatasi ancaman ini secara sendirian. Oleh karena itu, menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga merupakan langkah awal yang penting.

Menurut Buzan dan Waever, persebaran ancaman terhadap keamanan lebih dipengaruhi oleh situasi di sekitarnya, yang mereka sebut sebagai *regional security complex* (RSC). Oleh karena itu, menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga bukan hanya kebijakan yang bijaksana, tetapi juga suatu keharusan..

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan melalui *literature review* atau dengan mempelajari tulisan-tulisan terdahulu yang sudah ada sebelumnya.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Selama sepuluh tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang proaktif dengan moto "seribu kawan dan nol musuh" (*thousand friends zero enemy*). Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia aktif dalam urusan internasional (*outward looking*) dan menjaga citra positif di mata dunia melalui partisipasinya dalam forum-forum internasional. Di sisi lain, Joko Widodo lebih memusatkan perhatian pada kebijakan dalam negeri (*inward looking*), terutama dalam memperkuat sektor ekonomi dan infrastruktur. Kedua model kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Mayoritas potensi ancaman yang dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara saat ini bersifat asimetris, termasuk permasalahan seperti *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) fishing, terorisme, perompakan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ancaman dari luar kawasan yang berdampak pada situasi strategis di Asia Tenggara adalah klaim yang dilakukan oleh China atas Laut China Selatan, yang berdampak pada kedaulatan negara-negara seperti Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Indonesia. Ancaman-ancaman ini memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas, perkembangan ekonomi, keamanan, dan perpolitikan regional, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pembangunan di dalam negeri.

Ketidakselesaian berbagai potensi ancaman dari dalam dan luar kawasan ini terjadi karena sifatnya yang lintas batas negara. Untuk mengatasi tantangan-tantangan lintas batas ini, penyelesaiannya memerlukan kerja sama lintas batas negara, baik di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, kerja sama internasional dan multilateral menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah ini. Untuk mewujudkan kerja sama internasional antar-negara, stabilitas dan penghindaran konflik atau sengketa menjadi faktor yang sangat penting, mengingat perkembangan lingkungan strategis telah menghasilkan banyak ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara.

Stabilitas keamanan nasional merupakan suatu keadaan yang timbul dari terpeliharanya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, penanggulangan pelanggaran wilayah perbatasan, penanggulangan penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, serta pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

Salah satu ancaman yang signifikan bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara saat ini adalah terorisme. Fenomena terorisme telah menjadi ancaman yang nyata dalam kawasan ASEAN, dan ini telah berlangsung sejak lama. Situasi ini semakin rumit karena kurangnya kesepakatan terkait masalah terorisme di antara negara-negara ASEAN, sensitivitas terkait isu kedaulatan, dan ketidakseimbangan dalam kemampuan pertahanan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kondisi ini berpotensi menghasilkan penyebaran terorisme ke wilayah-wilayah negara lain, karena beberapa negara mungkin tidak mampu secara efektif mengatasi ancaman terorisme di wilayahnya sendiri. Terorisme di Asia Tenggara menjadi fokus perhatian khusus bagi negara dan masyarakat dalam kawasan sejak peristiwa bom Bali 1 pada tahun 2002. Pada peristiwa ini, diketahui bahwa serangan bom tersebut didukung oleh jaringan terorisme Al Qaeda yang berasal dari luar wilayah Asia Tenggara.

Saat ini, situasi dan kondisi yang terus berkembang memungkinkan jaringan terorisme untuk menyebarkan ideologi mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam dunia digital, seperti media sosial, internet, dan platform obrolan online. Generasi terbaru terorisme ini telah disebut sebagai "terorisme generasi ketiga" oleh Menteri Pertahanan Indonesia Rayamizard Ryacudu dalam kasus Bom Surabaya. Mereka tidak hanya berfokus pada aksi terorisme terhadap non-Islam, tetapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan negara berdasarkan hukum Islam, seperti yang terjadi dalam jaringan ISIS (*Islamic State*) yang menyebar melalui media sosial, jaringan informal, dan pelatihan dari kelompok teroris asing.

Pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan bahwa "tidak ada negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh, dan tidak ada negara yang Indonesia anggap sebagai musuh. Dengan demikian, Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negerinya dengan bebas dalam semua arah, memiliki sejuta teman dan nol musuh." Pernyataan ini mengandung makna bahwa Indonesia aktif mendorong kerja

sama yang positif dengan semua negara, serta menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak suka terlibat dalam konflik. Dari konteks ini, dapat disimpulkan bahwa SBY berusaha untuk membangun hubungan internasional yang baik dengan negara-negara ASEAN dan tetangga-tetangga di sekitar ASEAN.

Pendekatan ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia sejak masa orde baru yang dikenal sebagai "*Concentric Circle Formula*." Dalam konsep ini, ASEAN dianggap sebagai fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan ditempatkan di lingkaran pertama sebagai "*cornerstone*" politik luar negeri. Di lingkaran kedua, terdapat negara-negara yang tergabung dalam Pacific Island Forum dan South West Pacific Dialogue, serta konsultasi tripartite antara Indonesia, Australia, dan Timor Timur. Lingkaran konsentris kedua ini juga mencakup ASEAN + 3, yang melibatkan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Di lingkaran ketiga, fokusnya adalah pada kerja sama dengan negara-negara ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dalam konteks isu Laut China Selatan (LCS), Indonesia di bawah pemerintahan SBY mengambil peran sebagai mediator yang selalu menekankan pentingnya penyelesaian damai terhadap masalah tersebut. Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa LCS dan berperan penting dalam menjaga stabilitas regional serta mencegah konflik terkait isu LCS.

Dalam konteks isu terorisme, pada masa pemerintahan SBY, Indonesia menjelaskan dirinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang menentang tindakan terorisme yang dilakukan atas dasar agama Islam. Prof. Makarim Wibisono pernah menyatakan bahwa setelah peristiwa 9/11, Indonesia berusaha membuktikan kepada dunia bahwa tidak semua orang yang memeluk agama Islam adalah teroris. SBY aktif berpartisipasi dalam berbagai forum global yang berfokus pada upaya melawan terorisme, termasuk sebagai ketua *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Counter Terrorism Task Force*, dan memainkan peran penting dalam membangun dialog dengan negara-negara non-Islam untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam.

SBY secara konsisten menekankan bahwa agama Islam menentang segala bentuk ekstremisme. Pesan ini diungkapkan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat bertemu

dengan Iyad Ameen Madani, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Pertemuan ini terjadi selama pertemuan ke-6 *United Nations Alliance of Civilizations* (UNAOC) di Bali pada tahun 2014.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan luar negeri Indonesia dapat dikatakan memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan era Presiden SBY. Banyak yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo memiliki orientasi yang lebih *inward looking*, yaitu lebih berfokus pada perkembangan dalam negeri. Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan ini adalah latar belakang dan pengalaman kepemimpinan kedua presiden tersebut.

SBY, yang memiliki latar belakang militer dan telah memiliki pengalaman dalam politik nasional dan internasional, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan Joko Widodo, yang sebelumnya kurang terbiasa dengan forum-forum internasional multilateral.

Joko Widodo menerapkan kebijakan yang disebut sebagai "*down-to-earth diplomacy*" atau diplomasi yang lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Pendekatan diplomasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, kerja sama dengan negara-negara lain lebih difokuskan pada kepentingan nasional, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia tidak terlalu menekankan pembentukan citra positif di arena internasional. Joko Widodo lebih mengutamakan pencapaian hasil yang cepat dari kerja sama internasional yang dijalankan oleh Indonesia.

Kebijakan Indonesia yang memberikan nama "Laut Natuna Utara" dalam peta baru NKRI mencerminkan secara tidak langsung tindakan halus untuk menentang ekspansi Tiongkok dan klaim "Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok" yang sering kali melanggar hak ekonomi negara-negara tetangga yang memiliki ZEE. Studi mengenai keamanan sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan strategis global yang awalnya bersifat bipolar selama masa Perang Dingin, yang ditandai dengan dominasi isu-isu militer strategis. Pada masa itu, keamanan lebih dilihat dari sudut pandang militer, termasuk isu persenjataan, personel militer, dan unsur-unsur kekuatan lainnya. Selain itu, studi keamanan juga menjadi bagian dari kebijakan dan kepentingan negara-negara besar

dalam memperkuat pengaruhnya di negara atau wilayah lain, serta dalam rangka membangun aliansi strategis.

Namun, seperti halnya studi lain dalam bidang Hubungan Internasional, studi keamanan juga mengalami pergeseran paradigma yang mengkritik pandangan yang homogen tentang karakter keamanan. Era bipolaritas dalam sistem global juga berdampak pada munculnya krisis-krisis yang tidak hanya terkait dengan aspek militer dan senjata, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi kemanusiaan lainnya. Kritik tersebut akhirnya memunculkan pendekatan keamanan nontradisional pada akhir tahun 1980-an. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan *Copenhagen School* yang mengidentifikasi lima dimensi keamanan, yaitu ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan militer. Selain itu, pendekatan ini juga mengubah fokus dari subjek keamanan dari negara menjadi masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran yang terdapat dalam karya Barry Buzan yang dijelaskan dalam bukunya berjudul "*Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*".

*Down-to-Earth Diplomacy* juga dapat diinterpretasikan sebagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan domestik, khususnya kepentingan masyarakat Indonesia, dengan fokus pada isu-isu sosial ekonomi yang langsung memengaruhi mereka. Meskipun berfokus pada isu-isu dalam negeri, hal ini tidak berarti bahwa Joko Widodo mengabaikan kebijakan luar negerinya. Prioritas kebijakan luar negeri Joko Widodo terutama berfokus pada aspek ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

Sebagai contoh, saat ini Indonesia tengah aktif dalam beberapa perundingan ekonomi, termasuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*, *Free Trade Agreement (FTA)*, *Preferential Trade Agreement (PTA)*, dan akan memulai perundingan *Bilateral Investment Treaty (BIT)*. Di samping isu ekonomi, kebijakan luar negeri Indonesia juga berhasil dalam hal melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Selama tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo dari 2015 hingga 2017, berhasil menyelesaikan sekitar 25.620 kasus hukum yang melibatkan WNI. Selain itu, berhasil mengatasi sekitar 1.035 kasus tindak pidana perdagangan orang.

Joko Widodo tidak sangat aktif dan vokal dalam forum-forum internasional yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Sebaliknya, ia lebih cenderung untuk

mengalihkan tanggung jawab terkait dengan forum-forum tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kemunculan ISIS dan peningkatan aktivitas kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina telah meningkatkan frekuensi pertemuan dan komitmen pemimpin-pemimpin di kawasan, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Joko Widodo tidak secara langsung terlibat dalam inisiatif-inisiatif tersebut, seperti kerja sama di tingkat ASEAN yang menghasilkan pembentukan "*Our Eyes*." Ini adalah sebuah kerja sama yang bertujuan untuk pertukaran informasi strategis guna meningkatkan keamanan kawasan, dan inisiatif ini digagas oleh enam Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, pada tahun 2018.

Sementara itu, dalam konteks isu Laut China Selatan (LCS), Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo tidak memegang peran yang sentral. Penurunan peran Indonesia dalam kerangka ASEAN terkait isu LCS telah mengakibatkan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Pembangunan pangkalan militer oleh China di wilayah LCS, yang kemudian diikuti oleh tindakan serupa dari Indonesia di Natuna, mencerminkan bahwa mekanisme kerja sama ASEAN mengalami kendala. Secara keseluruhan, Joko Widodo cenderung menunjukkan kepemimpinan yang lebih berorientasi pada penguatan dalam negeri (*inward looking*).

#### **D. SIMPULAN**

Isu Terorisme Global sudah lama menjadi isu penting yang perlu diperhatikan eksistensinya. Walaupun Indonesia sudah mendeklarasikan diri sebagai negara non-blok, tidak dapat dipungkiri bahwasannya isu terorisme global juga menjadi salah satu *concern* yang perlu Indonesia perhatikan.

Pendekakatan yang dilakukan dua presiden Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan 2024 terbilang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Indonesia yang merupakan negara bebas dan non-blok. Kebijakan luar negeri milik presiden Joko Widodo yaitu *Down to Earth Diplomacy* terlihat memiliki visi dan misi yang sama dengan kebijakan luar negeri milik presiden sebelumnya (Susilo Bambang Yudhoyono) yaitu diplomasi dengan jargon seribu kawan dan nol musuh.

Walaupun terlihat sama bukan berarti sama, latar belakang dari kedua presiden ini menjadi pembeda yang menonjol dari diambilnya dua kebijakan luar negeri ini. Dimana SBY dengan latar belakang militernya lebih mementingkan dampak luar (*outward looking*) Sedangkan presiden Jokowi yang condong terhadap dampak masyarakat (*inward looking*) dimana kebijakan ini berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dengan cara yang cepat dan efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal**

- Alif Alvia, Rizky, Ganesh Cintika Putri, & Irfan Ardhani. "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo", *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 2 (Maret 2018): 152
- Buzan, Barry & Ole Waever, *Regions and Powers: The structure of International Security (USA: Cambridge University Press, 2003)*
- Hutasoit, I. R., Yonas, A. R., & Drajadi Nugrahani, H. S. (2021). Penanganan Imigran dan Terorisme di Uni Eropa (*Handling Immigrants and Terrorism in the European Union*). *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3). <https://doi.org/10.29210/020211264>
- Nashir, A. K., Riyadi, S. F. (2019). *Indonesian Nationalism in Natuna Border: Impact of South Chinese Marine Conflict on Indonesian Nationalism Values in Natuna Border Areas. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(9), 1-11.
- Reksoprodjo, A. H. S., Widodo, P., Timur, F. G. C., Peperangan, P., Fakultas, A., Pertahanan, S., & Pertahanan, U. (2018). Pemetaan Latar Belakang dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia (*Mapping the Background and Motive of Terrorists in indonesia*). *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 4(2).
- R Widya Setiabudi Sumadinata, Willya Achmad, Sayed Fauzan Riyadi, "Indonesian Border Defense Policy: A Case Study on the Interoperability of the joint regional defense command"
- Situmorang, Mangadar, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan JokowiJK," Makalah Kegiatan Networking Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara (2014): 72".
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10).
- Tatara, B. A., Margiyati, T., & Timur, F. G. C. (2023). Ancaman Terorisme dan Strategi Penanganannya: Studi Pustaka Strategi Kontra-Terrorisme di Kamboja. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638>

**Web**

- Chandran, N. "Family Terrorism is Southeast Asia's Newest Threat, Defense Officials Warn," *CNBC Asia Pacific News*
- Gatra, Sandro, "Presiden SBY dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS dan Boko Haram", *Kompas.com*
- Tumanggor, Fetra. "Melihat Politik Luar Negeri Jokowi," *Tagar News*